

© Mayank Bhatnagar
graphicreflections.org



Trend Korupsi 2010 Semester I

CORRUPTION

INDONESIA CORRUPTION WATCH
www.antikorupsi.org

© Mayank Bhatnagar
graphicreflections.org

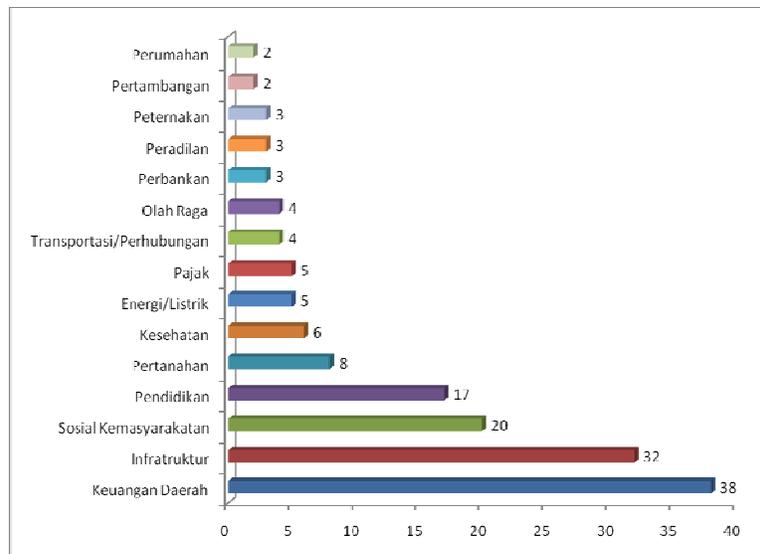
Trend Korupsi Semester 1 2010

- Selama periode 1 Januari – 30 Juni 2010 ditemukan 176 kasus korupsi yang terjadi baik di level pusat maupun daerah.
- Aktor yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum sebanyak 441 orang.
- Sedangkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp. 2,102,910,349,050 (Dua triliun seratus dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Perbandingan Penindakan Kasus Korupsi Sem I 2009 dengan 2010

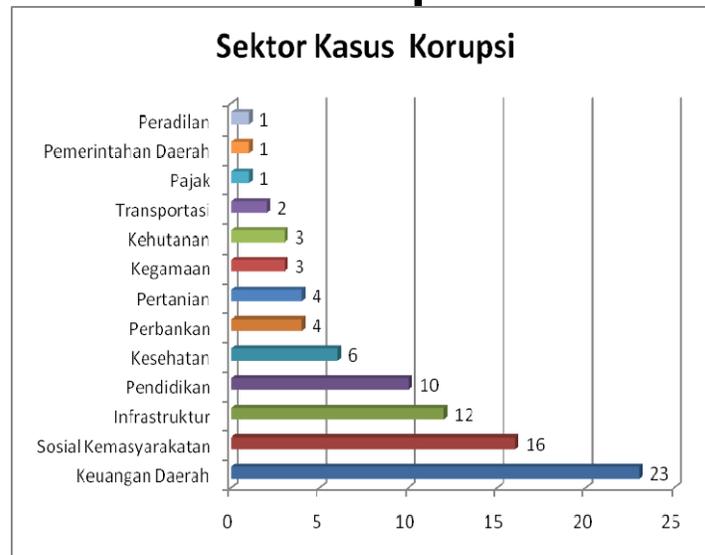
	Sem I 2009	Sem I 2010
Jumlah kasus	86 kasus	176 kasus
Kerugian Negara	Rp 1,17 triliun	Rp 2,1 triliun
Jumlah Tersangka	217 tersangka	441 tersangka

Sektor Korupsi 2010



Cat : Hanya ditampilkan 15 sektor tertinggi

Sektor Korupsi 2009



© Mayank Bhatnagar
graphicreflections.org

Temuan :

Baik tahun 2009 maupun tahun 2010, Keuangan daerah tetap sebagai sektor yang paling rawan dikorupsi dengan APBD sebagai objek korupsinya

Beberapa kasus APBD dengan potensi kerugian negara yang sangat besar selama tahun 2010 :

- Kasus pembobolan kas daerah Aceh utara sebesar 220 miliar
- Kasus korupsi APBD di Indragiri hulu sebesar 116 miliar
- Kasus korupsi kas daerah di Pasuruan Jawa Timur sebesar 74 Miliar
- Kasus korupsi dana otonomi daerah di Kabupaten Boven Digoel sebesar 49 Miliar.

Sektor Korupsi Berdasarkan Jumlah Kerugian Negara

5 tertinggi sektor korupsi yang menyumbangkan potensi kerugian negara terbesar dengan jumlah kasus yang banyak hanya diduduki oleh sektor keuangan daerah dengan Rp. 596,232 miliar (38 kasus).

Sedangkan 4 sektor lainnya yaitu

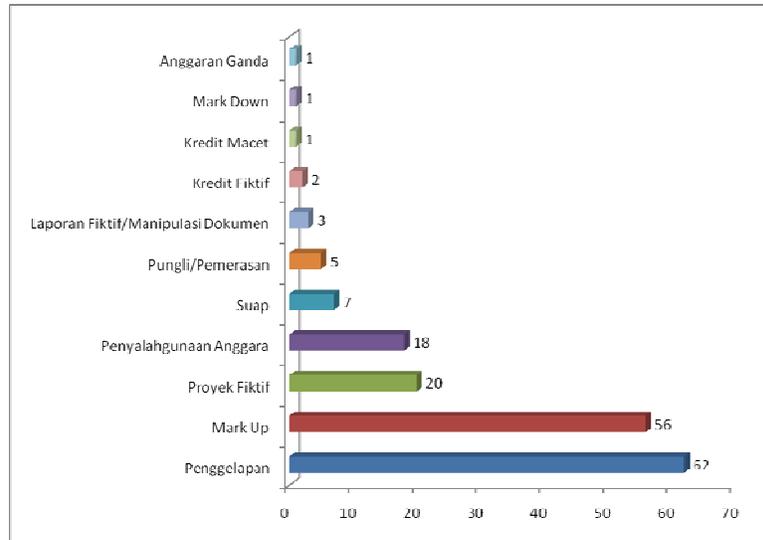
- Perizinan Rp 420 miliar (1 kasus),
- Pertambangan Rp.365,5 miliar (2 kasus),
- Energi/listrik Rp.140,8 miliar (5 kasus).

Temuan :

Sektor	Jumlah Kasus	Kerugian Negara
Keuangan Daerah	38	Rp 596,232,974,572
Perizinan	1	Rp 420,000,000,000
Pertambangan	2	Rp 365,500,000,000
Energi/Listrik	5	Rp 140,800,000,000
Perbankan	3	Rp 96,120,000,000
Sosial Kemasyarakatan	20	Rp 81,043,500,000
Infrastruktur	32	Rp 74,845,746,205

- Sektor pertambangan yang jumlah kasusnya sedikit tetapi merugikan negara dalam jumlah besar
- Selain keuangan daerah, sektor yang sangat rawan menimbulkan kerugian negara yang besar adalah sektor energi, pertambangan dan perbankan
- Aparat penegak hukum harus meningkatkan kewaspadaan penanganannya di tiga sektor tersebut

Modus Korupsi 2010



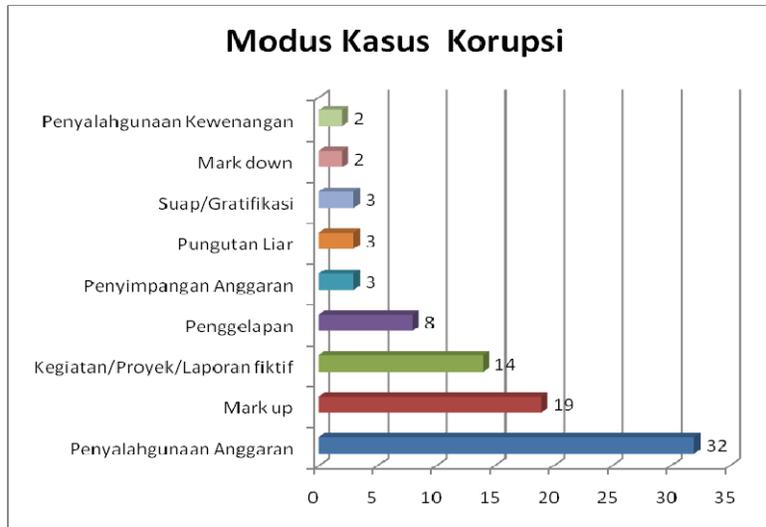
© Mayank Bhatnagar
graphicreflections.org

Temuan :

5 besar modus korupsi yang terungkap selama semester 1 2010, ternyata modus penggelapan merupakan yang paling dominan dengan 62 kasus.

Diikuti modus mark up 52 kasus, proyek fiktif 20 kasus, penyalahgunaan anggaran 18 kasus dan suap 7 kasus

Modus korupsi 2009



Temuan: Terjadi Pergeseran modus

Modus tertinggi selama semester I tahun 2009 adalah modus *penyalahgunaan anggaran* tertinggi dengan 32 kasus

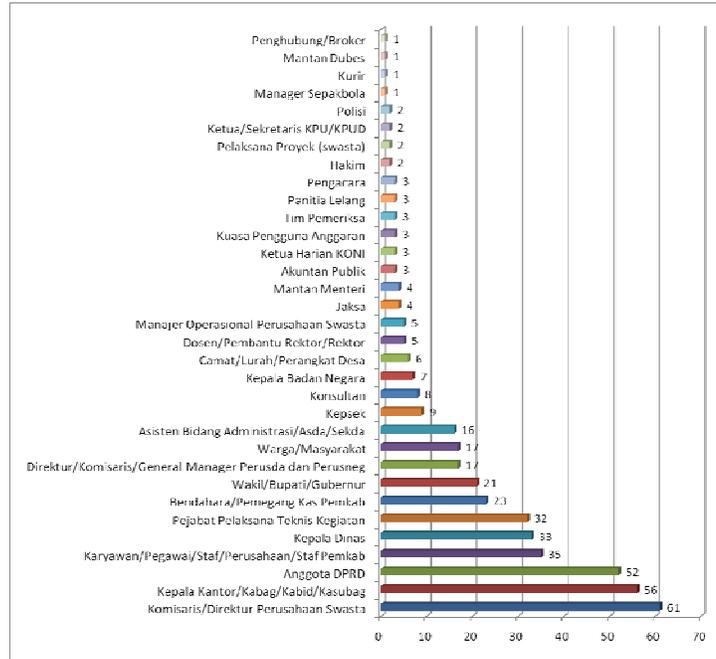
Sedangkan di semester I tahun 2010 modus *penggelapan* merupakan yang paling dominan dengan 62 kasus

Analisis :

Ini terkait dengan kondisi politik yang terjadi. Tahun 2008 dan 2009 adalah tahun persiapan menjelang pemilu.

modus *penggelapan*, umumnya terkait dengan penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat seperti dana-dana bantuan sosial (bansos), yang marak terjadi tahun 2008 dan 2009

Aktor Korupsi 2010

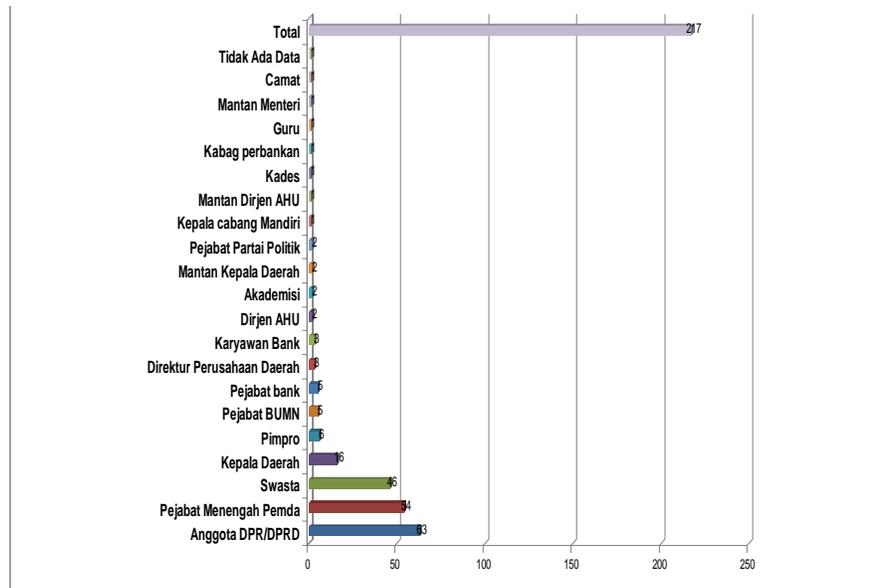


© Mayank Bhatnagar
graphicreflections.org

Temuan :

- Ada peningkatan keterlibatan aktor dari sektor swasta khususnya dengan latar belakang jabatan komisaris/direktur perusahaan swasta. Setidaknya 61 orang sudah ditetapkan tersangka.
- Tipologi kasus yang melibatkan aktor dari swasta umumnya terkait pengadaan barang dan jasa (Procurement). Itu artinya ada upaya massif di kalangan sektor swasta untuk menggerogoti anggaran daerah melalui kegiatan-kegiatan pengadaan
- 4 pelaku tertinggi lain diikuti oleh Kabag/kabid (56 orang), anggota DPRD (52 orang), karyawan/staf di pemerintahan kab/kota (35 orang) dan Kepala Dinas (33 orang).

Aktor korupsi 2009



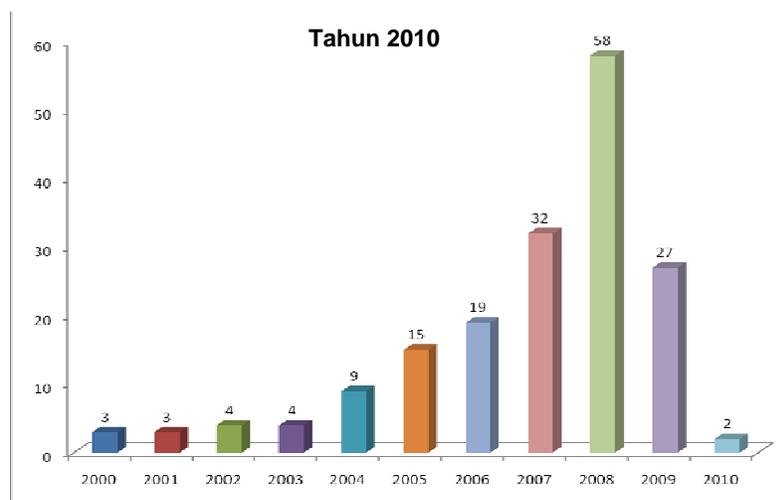
Temuan :

- Jika dibandingkan antara smt 1 2009 dan smt 1 2010, menunjukkan ada pergeseran aktor korupsi dari aktor yang didominasi anggota legislatif menjadi aktor dari sektor private
- Orientasi sektor swasta masih sebatas mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai cara, baik suap, berupaya agar ditunjuk langsung, menggelembungkan harga, proyek/ laporan fiktif
- Keterlibatan aktor dari DPRD tetap harus diwaspadai meski keterlibatannya semakin menurun (peringkat 3 di smt 1 2010).

Kasus korupsi berdasarkan klasifikasi Lembaga

No	Klasifikasi Lembaga	Jumlah Aktor	Prosentase
1.	Eksekutif	280	63,49 %
2.	Legislatif	52	11,79 %
3.	Yudikatif	2	0,45 %
4.	BPK	3	0,68 %
5.	Komisi Negara	2	0,45 %
6.	Swasta	85	19,27%
7.	Masyarakat	17	3,85 %
Jumlah		441	100 %

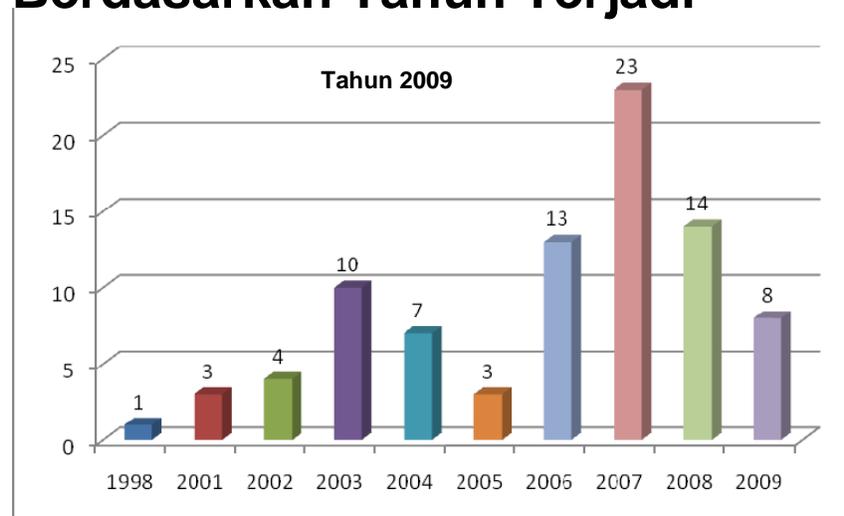
Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun Terjadi



Temuan :

- Lima kasus tertinggi yang di sidik tahun 2010 adalah kasus yang terjadi tahun 2008 yaitu 58 kasus, tahun 2007 dengan 32 kasus, tahun 2009 dengan 26 kasus, tahun 2006 dengan 19 kasus dan tahun 2005 dengan 15 kasus.
- Khusus untuk kasus yang terjadi pada tahun 2010 dan telah ditetapkan penyidikan yaitu Kasus dalam pengurusan perkara sengketa tanah yang melibatkan PT Sabar Ganda di Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kasus yang melibatkan auditor BPK khususnya terkait agar rekayasa laporan keuangannya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Pemerintah Kota Bekasi.
- Kasus tersebut merupakan kasus penyuapan dimana pelakunya tertangkap tangan oleh KPK

Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun Terjadi



Temuan :

- Gambaran penegakan hukum kasus korupsi 2009 dan 2010 tidak jauh berbeda dimana aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK lebih dominan menangani kasus-kasus korupsi dua tahun sebelumnya
- Kecuali untuk kasus suap yang ditangani KPK, berdasarkan gambaran tersebut bisa dikatakan respon penegak hukum dan proses hukum kasus korupsi sangat lambat

Temuan :

- Selama semester I 2010 setidaknya tercatat 176 kasus korupsi yang statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 176 kasus tersebut, jajaran kejaksaan yang paling dominan menangani kasus korupsi di berbagai daerah dengan 137 kasus, Kepolisian 25 kasus dan KPK 14 kasus.
- Sesuai gambaran tersebut terlihat bahwa penanganan kasus oleh kejaksaan dan kepolisian lebih baik secara kuantitas dibanding dengan KPK. Hal ini bisa dimaklumi karena dua institusi tersebut merupakan instansi vertikal yang terstruktur hingga tingkat kabupaten/kota sehingga idealnya tentu harus lebih dari segi kuantitatif.

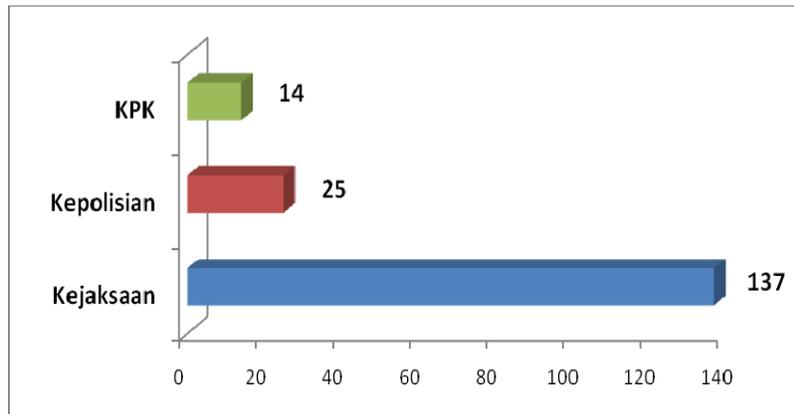
Temuan :

- Ada sedikit kemajuan di institusi kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus korupsi. Kejaksaan misalnya mulai berani menangani kasus korupsi yang melibatkan mantan menteri yaitu Yusril Ihza Mahendra dalam kasus Sisminbakum dan Pengusaha Hartono Tanoesudibjo.
- Kemudian kepolisian sendiri telah menetapkan tersangka dua anggotanya Kopol Arafat dan AKP Sri Sumartini, dua jaksa yaitu Cirus Sinaga dan Poltak Manullang serta satu hakim Mustadi Asnun yang diduga terlibat dalam kasus suap dan manipulasi pajak.
- Namun lagi-lagi kemajuan proses penanganan hukum di dua institusi tersebut masih harus dipertanyakan apakah hasilnya juga akan memuaskan publik, apalagi dua institusi ini memiliki kewenangan untuk memberikan SP3 dan SKP2.

Temuan :

- Kasus pemberian SP3 terhadap Muhammad Hatta, tersangka kasus Korupsi di KBRI Thailand dan pemberian sanksi administrative terhadap raja erizwan dan Edmon dalam kasus pajak menjadi indikator ketidakseriusan Kejaksaan dan Kepolisian menangani kasus korupsi.
- bagaimana dengan penanganan kasus di KPK ? Meski minim kuantitas menonjol secara kualitas baik dari metode yang digunakan maupun aktor yang berhasil terjerat.
- Selama 1 semester ini setidaknya sudah 7 orang yang tertangkap tangan saat melakukan transaksi suap menyuap, Kemudian jika dari segi aktor dengan latar belakang jabatan kepala daerah terdapat 21 orang sedangkan anggota DPR/D 52 orang yang telah ditetapkan tersangka.

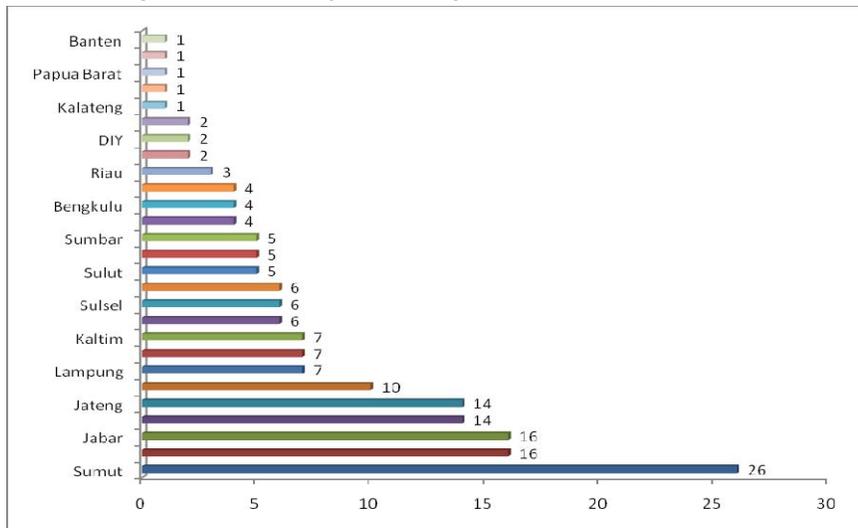
Jumlah kasus yang ditangani institusi penegak hukum tahun 2010



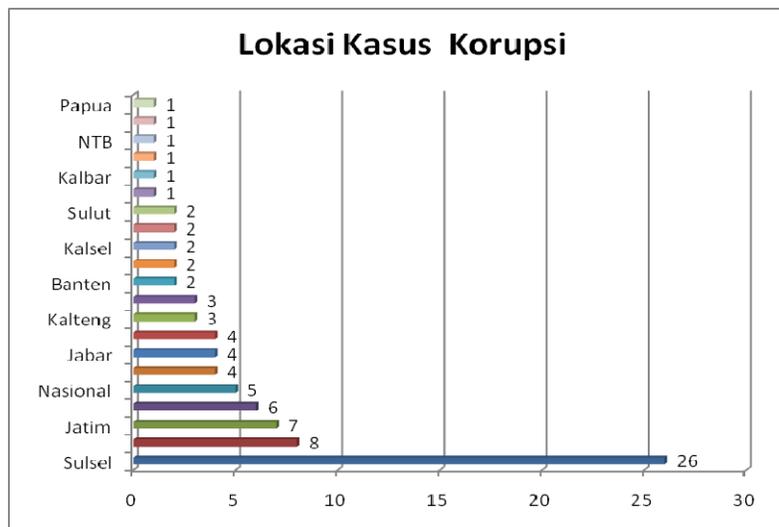
Potensi Kerugian Negara Berdasarkan Kategori Institusi Penegak Hukum

Penegak Hukum yang Menyidik	Jumlah Kasus	Kerugian Negara
Kejaksaan	137	Rp 1,576,536,897,027
Kepolisian	25	Rp 327,513,452,023
KPK	14	Rp 198,860,000,000
Total	176	Rp 2,102,910,349,050

Wilayah Terjadinya Korupsi 2010



Wilayah Terjadinya Korupsi 2009



Temuan :

- Korupsi di semester awal 2010 ini terjadi di 27 Propinsi. Dari 27 propinsi tersebut, 5 propinsi yang paling tinggi kasus korupsinya yaitu Sumatera Utara (26 kasus), Jawa Barat (16 kasus), Propinsi DKI Jakarta (16 kasus) (kasus yang terjadi pemerintah pusat masuk klasifikasi DKI Jakarta), Nanggroe Aceh Darussalam (14 kasus), Jawa Tengah (14 kasus).
- Sedangkan potensi kerugian negara yang paling besar ditimbulkan oleh kasus-kasus yang terjadi dalam wilayah Propinsi DKI Jakarta dengan Rp. 709,514 miliar (12 kasus), diikuti oleh Lampung dengan Rp.408,382 miliar (7 kasus), Nanggroe Aceh Darussalam dengan Rp.275,1 miliar (14 kasus), Maluku, Rp.118,875 miliar (6 kasus) dan Riau dengan Rp.117,75 miliar (3 kasus)

© Mayank Bhatnagar
graphicreflections.org

Kesimpulan

- Sektor Keuangan daerah (APBD) tetap merupakan sektor yang paling dominan untuk dikorupsi
- Tahun 2010 terjadi pergeseran modus korupsi yang dominan dari penyalahgunaan anggaran (2009) ke penggelapan
- Tingginya modus penggelapan tersebut terkait dengan penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat seperti dana-dana bantuan sosial (bansos), yang marak terjadi tahun 2009 dan 2010.
- Terjadi penurunan kinerja KPK, dilihat dari jumlah potensi kerugian negara dari kasus yang ditangani KPK, dimana semester 1 2010 (184,6 miliar) sedangkan tahun 2009 mencapai (431,2 miliar). Penurunan ini terkait penindakan KPK pada smt 1 2010 terhadap kasus-kasus suap yang tidak ada kerugian negaranya

Rekomendasi

- Peningkatan kapasitas DPRD dalam mengawasi APBD
- BPK tidak hanya menyerahkan temuan bersifat administratif tetapi juga temuan yang bersifat pidana sehingga tidak
- Kampanye pemberantasan korupsi pemerintah disektor swasta perlu ditingkatkan (selaras dengan UNCAC)
- Pengawasan ketat menjelang peristiwa-peristiwa politik daerah (Pilkada)

Periode Pemantauan

- **Pemantauan dilakukan selama periode 1 Januari 2010 – 30 Juni 2010**
- **Laporan ini disusun berdasarkan data yang bersumber dari media, termasuk didalamnya data kasus yang bersumber dari website kejaksaan (kejaksaan.go.id).**

Metode Pemantauan

- Kasus korupsi yang dipantau adalah seluruh kasus yang statusnya dalam tahap penyidikan dan aparat penegak (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menetapkan tersangka yang diduga terlibat.
- Sumber data dari media masa cetak dan elektronik (yang memiliki versi web), dan media online yang ada di Indonesia (termasuk website kejaksaan.go.id)
- Pemantauan dilakukan dengan cara membagi pemantau berdasarkan wilayah-wilayah administratif, kemudian hasilnya dikompilasi dan diolah secara kuantitatif

Tim Penyusun

- Agus Sunaryanto
- Lais Abid
- Febri Hendri
- Tama S Langkun